

## **Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan PPN di Indonesia Periode 2005 – 2020**

**Nadia Amelia**

Universitas Trisakti, Jakarta

**Tri Kunawangsih**

Universitas Trisakti, Jakarta

Email: [nadiaamelia284@gmail.com](mailto:nadiaamelia284@gmail.com)

**Abstract.** *The purpose of this study is to ascertain how GDP, inflation, and exchange rate affect VAT collection. Multiple linear regression or ordinary least squares is the research model used (OLS). The amount of VAT collected is the dependent variable in this study; the independent variables are inflation, exchange rate, and gross domestic product. The data in the time series is for example (2005-2020). Inflation, exchange rate, and inflation only have a small impact on VAT revenue, while GDP has a considerable positive impact.*

**Keywords:** *Gross Domestic Product, VAT, exchange rate, Inflation*

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bagaimana PDB, inflasi, dan nilai tukar mempengaruhi penarikan PPN. Regresi linier berganda atau kuadrat terkecil biasa adalah model penelitian yang digunakan (OLS). Besarnya PPN yang dipungut merupakan variabel dependen dalam penelitian ini; variabel independennya adalah inflasi, nilai tukar, dan produk domestik bruto. Data dalam time series adalah contohnya (2005-2020). Inflasi, nilai tukar, dan inflasi hanya berdampak kecil pada penerimaan PPN, sedangkan PDB memiliki dampak positif yang cukup besar.

**Kata kunci:** Produk Domestik Bruto, PPN, Nilai Tukar, Inflasi

## **LATAR BELAKANG**

Pajak berperan penting didalam penyelenggaraan negara sebab pajak menjadi satu dari beberapa sumber pendapatan negara dan penyumbang terbesar pembiayaan negara, maka, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Penerimaan pajak menyumbang hampir 70% dari total pendapatan pemerintah (Elita, 2012).

Salah satu komponen terpenting dari keuangan negara Indonesia adalah pendapatan pajak, yang membantu memastikan bahwa pertumbuhan negara terus berlanjut tanpa bergantung pada sumber daya serta bantuan dari luar. Pernyataan oleh Fjeldstad (2013) mengatakan struktur pajak yang efisien akan mampu mendorong pertumbuhan guna mengurangi ketergantungan pada bantuan asing serta penggunaan SDA yang melampaui batas. (Trimo et all, 2018).

Sumber penerimaan negara yang terkait dengan pajak beragam. Pada dasarnya, pajak sering akan dipungut setiap kali subjek pajak telah memperoleh sejumlah uang tertentu yang sudah ditetapkan UU yang berkaitan. Apabila dibandingkan pada pajak lainnya, pajak pertambahan nilai merupakan bagian yang signifikan dari penerimaan pajak dalam negeri yang berbeda.

Salah satu dari sekian banyak sumber penerimaan negara yang selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat adalah penerimaan pajak. Untuk melakukan ini, undang-undang dan peraturan perpajakan harus diperbarui. PPN merupakan sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mengatur tentang PPN dan PPnBM, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dipungut secara bertahap pada setiap jalur produksi dan distribusi. Penerimaan PPN dipengaruhi oleh ekonomi lokal karena peningkatan pengeluaran konsumen untuk barang dan jasa akan meningkatkan PPN sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi PPN yakni ada Inflasi, Nilai Tukar, dan PDB. Inflasi dikenal sebagai kecenderungan untuk harga naik di seluruh sektor, sehingga meningkatkan pendapatan serta beban perusahaan. Menurut Sukirno (2004:27), inflasi ialah proses naiknya harga yang menjadi lazim didalam sebuah perekonomian. Menurut Mishkin (2008:347), pemeriksaan permintaan serta penawaran agregat

memperlihatkan bahwasanya tingkat inflasi yang tinggi hanya bisa terjadi ketika jumlah uang beredar tinggi.

Tingkat inflasi suatu negara berfungsi sebagai alat ukur untuk mengukur perubahan dan dikatakan ada jika kenaikan harga terjadi secara konsisten dan berdampak satu sama lain. Inflasi juga dapat merujuk pada kenaikan jumlah uang beredar, yang juga disalahkan atas kenaikan harga. Terdapat metode yang paling sering dimanfaatkan dalam memprediksi tingkat inflasi ialah CPI dan GDP Deflator. Indonesia pun pernah mengalami ini pada rezim sebelumnya (Wikipedia, 2019).

Biaya pinjaman untuk mendapatkan uang dari pemberi pinjaman selama jangka waktu pinjaman dikenal sebagai suku bunga. Suku bunga memegang peranan penting ketika terjadi gejolak ekonomi sebab kewenangan BI untuk melaksanakan kebijakan menaikkan atau menurunkan suku bunga dalam keadaan tertentu sebagai pemegang kekuatan moneter. Mengingat mayoritas bisnis besar wajib mengimpor banyak bahan bakunya dari negara lain, serta jika perusahaan memiliki utang luar negeri berbentuk mata uang asing, maka nilai tukar Rupiah berpengaruh, terutama penurunan pertumbuhan harga komoditas. produk konsumen. Jika korporasi dinilai dalam rupiah, penurunan mata uang dapat mengakibatkan kenaikan utang secara keseluruhan dan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi tentunya akan berdampak pada harga pasar yang akan naik.

Pertumbuhan ekonomi memberikan dampak bagi peningkatan penerimaan pajak. Keadaan ekonomi yang menguntungkan bagi kinerja ekonomi pelaku usaha dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi akan tercipta oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat. Peningkatan laba ini akan berlanjut pada meningkatnya kontribusi bagi penerimaan pajak. PDB pada umumnya ialah nilai barang serta jasa yang dihasilkan di sebuah tempat selama suatu periode waktu, serta perkembangan ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan tanda-tanda positif, sesuai dengan kondisi pertumbuhan PDB saat ini. Namun, pertumbuhan PDB dari tahun ke tahun tidak selalu terlayani dengan baik oleh rasio penerimaan pajak terhadap PDB. Hal yang menjadi masalah sering dibicarakan ialah ketika PDB negara tumbuh lebih cepat dari pendapatan pajaknya.

Ada sejumlah penelitian yang berhubungan pada Penerimaan PPN memakai indikator makro ekonomi yakni inflasi, nilai tukar rupiah, serta produk domestik bruto mempunyai hasil yang berbeda-beda antara lain Wulandari & Andyarini (2020) melakukan penelitian yang mendapati secara parsial Penerimaan PPN dipengaruhi oleh

PDB, inflasi, dan faktor lainnya; kurs mata uang rupiah tidak ada hubungannya dengan penerimaan PPN. Dampak simultan faktor PDRB, inflasi, dan nilai rupiah terhadap penerimaan PPN.

Yuliyanti & Estiningrum (2021) melangsungkan penelitian yang memperlihatkan inflasi memberikan pengaruh signifikan pada pajak pertambahan nilai. Inflasi bisa meningkatkan PPN melalui harga jual, akan tetapi tingginya tingkat inflasi akan membuat daya beli konsumen mengalami penurunan jadi penjualan akan menurun pula, hal ini mengharuskan perusahaan untuk selalu mengawasi rantai pasokan agar harga tetap stabil. Sapridawati et al., (2021) melaksanakan penelitian yang memperlihatkan bahwasanya inflasi serta nilai tukar rupiah memberikan pengaruh signifikan bagi penerimaan PPN.

Berdasarkan justifikasi tersebut, studi ini diharapkan dapat menentukan jumlah penerimaan PPN yang dihitung dengan menggunakan indikator ekonomi makro antara tahun 2005 dan 2020. Pentingnya mempelajari “Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Produk Domestik Bruto terhadap Penerimaan PPN di Indonesia Periode 2005-2020” dibahas dalam paparan latar belakang ini.

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar penerimaan PPN yang diukur dengan menggunakan indikator ekonomi makro dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan penjelasan sebelumnya. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui “Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Produk Domestik Bruto terhadap Penerimaan PPN di Indonesia Periode 2005–2020”. Berdasarkan konteks di atas, masalah ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Apakah jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dipengaruhi oleh inflasi?
2. Apakah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai berdampak pada nilai tukar rupiah?
3. Apakah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mempengaruhi Produk Domestik Bruto?

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak tersirat dengan istilah "Pajak Pertambahan Nilai" (PPN) yang dipahami sebagai penghubung antara setiap tahapan produksi dan distribusi dengan konsumsi barang di dalam daerah pabean. PPN dilaksanakan melalui proses kompensasi Pajak Masukan (PM) dengan Pajak Keluaran (PK) bukan merupakan pajak berganda (Sukardji, 2015).

Ada pajak langsung dan tidak langsung. Sama halnya dengan pajak penghasilan, pajak ini harus dibayar langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dipungut atau dialihkan kepada pihak lain. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atau dikenakan atas setiap tambahan nilai tambah pada barang atau jasa, maupun atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam atau di luar daerah pabean, serta atas pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengusaha Dikenakan Kena Pajak atas Barang atau Jasa.

Nama lain untuk PPN termasuk pajak barang dan jasa dan pajak pertambahan nilai (GST). Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, yang dibayar oleh pihak (pedagang) selain pengangkut pajak dan dipertanggungjawabkan langsung oleh penanggung pajak (konsumen).

### **Inflasi**

Menurut Boediono (1985), ialah kecenderungan harga-harga secara general mengalami peningkatan atau keadaan dimana nilai uang terus menurun. Inflasi disebut kenaikan harga barang atau jasa secara berkelanjutan sepanjang suatu periode waktu. (Subiyanto et al., 2022). Lalu Bawono & Kava Nasikin (2021) inflasi dipandang sebagai fenomena uang karena perubahan nilai terjadi di berbagai masyarakat atau komoditas.

Saat terjadi inflasi ketika harga secara terus menerus mengalami kenaikan sedangkan tingkat konsumsi masyarakat menurun, hal tersebut mengakibatkan uang yang beredar di masyarakat mengalami peningkatan (Mahadianto et al., 2019). Terjadinya inflasi akan menunjukkan konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa menurun, sedangkan penerimaan PPN sangat bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat, oleh karena itu pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi agar tingkat konsumsi tetap

stabil, sehingga akan memiliki dampak terhadap peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

### **Nilai Tukar**

Nilai tukar sebagai elemen penting dalam menunjang perekonomian terbuka, karena sangat berpengaruh terhadap neraca transaksi jual beli dan variabel makroekonomi lainnya. Nilai tukar memperlihatkan berapa rupiah yang dibutuhkan untuk mengubahnya ke mata uang lain. menurut Kuncoro (2001: 54) nilai tukar ialah jumlah rupiah yang diperlukan guna memperoleh satu dolar AS dikendalikan oleh penawaran dan permintaan. sedangkan Bawono & Kava Nasikin (2021) mendefinisikan nilai tukar sebagai pembandingan dari dua nilai mata uang negara yang berbeda.

Mankiw (2018) menggarisbawahi bahwa nilai mata uang suatu negara sebagai alat tukar dengan negara lain bergantung pada nilai tukar mata uang tersebut. Harga diubah dalam transaksi lintas batas sesuai dengan nilai tukar mata uang pembeli terhadap mata uang penjual.

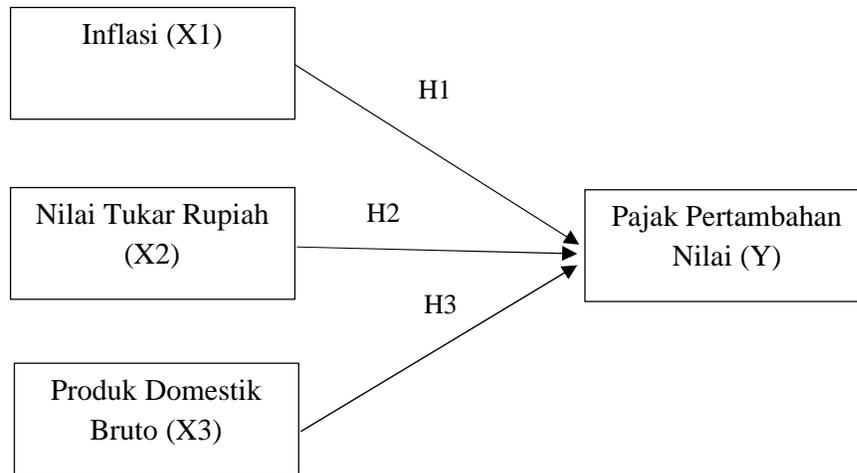
### **Produk Domestik Bruto**

Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur output ekonomi terlepas dari siapa yang memiliki komponen terkait produksi, PDB menyumbang semua input ekonomi produksi dan produk mereka. Oleh karena itu, PDB tidak memberikan gambaran yang komprehensif tentang seberapa besar output yang benar-benar diciptakan oleh unsur-unsur produksi yang merupakan bagian dari perekonomian domestik.

PDB dikatakan indikator terbaik karena mengukur pendapatan total setiap orang dan total pengeluaran negara untuk pembelian barang atau jasa dalam satu waktu secara bersamaan. PDB dapat mengukur total pendapatan dan pengeluaran secara bersamaan karena dalam perekonomian secara luas, nilai pendapatan harus sama dengan nilai pengeluaran.

Data PDB atau pendapatan nasional pada tahun tertentu memberikan gambaran sebagai berikut: menilai capaian sektor perekonomian, menilai capaian tingkat pertumbuhan ekonomi, menggambarkan informasi mengenai struktur kegiatan, menjelaskan tingkat kemakmuran, sebagai input dalam melakukan peramalan dan perencanaan kegiatan pada periode yang akan datang.

**KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Terjadinya inflasi mencerminkan perubahan perilaku para pelaku kegiatan ekonomi, hal ini dapat menggambarkan kondisi yang mengkhawatirkan atau bahkan membahayakan sektor ekonomi lainnya karena inflasi akan mempengaruhi setiap sektor dalam perekonomian. Pengendalian inflasi yang dilakukan tentunya akan berdampak pada semua sektor, mengingat dampak yang akan ditimbulkan tentunya akan sangat berisiko apabila inflasi tidak mampu dikendalikan secara efektif. Apabila kenaikan tingkat inflasi terjadi, akan berakibat pada naiknya harga jual dimana harga jualnya yaitu PPN. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Benkovskis & Fadejeva, 2014; Wulandari & Andyarini, 2020) mengatakan bahwasanya inflasi berpengaruh terhadap PPN. Uraian teori dan studi sebelumnya mendukung gagasan berikut, yang dikemukakan dalam studi ini:

**H<sub>1</sub> : Inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN**

Nilai mata uang satu negara dalam kaitannya dengan nilai mata uang negara lain sering digambarkan dengan nilai tukar, terkadang dikenal sebagai nilai tukar mata uang asing. Biaya barang atau jasa yang dibeli masyarakat umum meningkat ketika nilai rupiah menurun. Daya beli masyarakat akan menurun akibat penurunan nilai tukar rupiah, karena harga-harga cenderung naik tetapi tingkat pendapatan masyarakat tetap sama atau

tidak mengalami kenaikan. Penurunan daya beli barang ataupun jasa oleh masyarakat juga akan memberikan pengaruh bagi tingkat penerimaan PPN karena objek pengenaannya yaitu barang konsumsi dalam pabean. Deskripsi teori dan penelitian sebelumnya mengarah pada hipotesis berikut, yang diajukan dalam penelitian ini:

**H<sub>2</sub> : Nilai Tukar Rupiah berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN**

Pertumbuhan ekonomi yang tergambarkan melalui peningkatan PDB sangat erat kaitannya dengan kenaikan pendapatan negara yaitu pada sektor pajak, karena pajak pertambahan nilai dikenakan pada barang dan jasa, pertumbuhan PDB akan sesuai dengan peningkatan pendapatan negara dari pajak pertambahan nilai. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian Wulandari & Andyarini (2020) yang menunjukkan bahwa PDB berdampak positif terhadap PPN. Uraian teori dan studi sebelumnya mendukung gagasan berikut, yang dikemukakan dalam studi ini:

**H<sub>3</sub> : Produk Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap Penerimaan PPN**

**METODE PENELITIAN**

Regresi linier berganda, juga dikenal sebagai kuadrat terkecil biasa, disajikan sebagai model penelitian untuk studi ini (OLS). Sampel adalah data time series (2005-2020). Penerimaan PPN merupakan variabel dependen dalam penelitian ini, sedangkan inflasi, kurs, dan produk domestik bruto merupakan faktor independen

**Tabel 1. Definisi Operasional Pengukuran Variabel Penelitian**

Variabel	Simbol	Pengukuran	Skala Variabel
Penerimaan PPN	PPN	Tarif PPN x DPP	Nominal
Inflasi	Inf	$\frac{IHPB_t - IHPB_{t-1}}{IHPB_{t-1}} \times 100\%$	Rasio
Nilai Tukar	Kurs	$\frac{Rp/Usd}{Rp/Usd}$	Nominal
Produk Domestik Bruto	PDB	PDRB ADHB	Nominal

### **Metode Analisis**

Metode analisis seperti statistik deskriptif dan Untuk mengidentifikasi dampak variabel independen terhadap variabel dependen, digunakan analisis regresi berganda.

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PPN = a + \beta_1 INF + \beta_2 KURS + \beta_3 PDB + e$$

Keterangan:

a = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$  = Koefisien regresi

PPN = Penerimaan PPN

KURS = Nilai tukar Rupiah/US Dollar

INF = Inflasi

PDB = Produk Domestik Bruto

e = Error

Pengujian model regresi poolong dilakukan dengan tahapan

1. Pengujian model fit dengan koefisien determinansi ( $R^2$ ) yaitu menjelaskan seberapa baik perubahan variabel independen dapat menjelaskan perubahan variabel dependen.
2. Lakukan uji global untuk melihat apakah setidaknya satu variabel independen memiliki pengaruh besar terhadap variabel dependen pada tahap hipotesis (uji F). Tidak ada variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat, sesuai dengan rumus  $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_k = 0$ .  
 $H_a$  : Faktor dependen dipengaruhi oleh setidaknya satu komponen independen. Jika nilai p untuk F kurang dari 0,05, opsi  $H_0$  ditolak. Jika p-value untuk F lebih tinggi dari 0,05,  $H_0$  diterima.
3. Untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dilakukan pengujian individual (uji t).  
 $H_0$  : Jika  $\beta_i$  sama dengan 0, maka variabel ikatan tidak dipengaruhi oleh sejumlah variabel bebas.  
 $H_a$  :  $\beta_i \neq 0$  menunjukkan bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh faktor independen tertentu.

Jika p-value untuk t kurang dari 0,05, memilih apapun H0 ditolak. Jika p-value t lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Statistik Dekriptif**

Pada tahun 2018, Indonesia memiliki penerimaan PPN maksimal 537.267, artinya semakin banyak penerimaan PPN, semakin banyak uang yang diperoleh pemerintah. Nilai minimum 101.296 yang dimiliki Indonesia pada tahun 2005 menunjukkan bahwa penerimaan PPN Indonesia jauh dari target penerimaan yang ditetapkan.

Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), yaitu indeks dengan nilai maksimum 0,258220 yang dipegang Indonesia pada tahun 2005, digunakan untuk mengukur inflasi dan dalam hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami tingkat pertumbuhan harga secara menyeluruh. Saat dipegang oleh Indonesia pada tahun 2020, nilainya minimal -0.344200, menunjukkan bahwa Indonesia belum mengalami kenaikan harga secara keseluruhan yang signifikan.

Nilai Tukar Rupiah mencapai nilai maksimum sebesar 14.481 pada tahun 2018, yang menandakan nilai keseluruhan Rupiah terhadap mata uang lainnya mengalami penurunan. Selain itu, nilai minimal 89,91 yang dimiliki Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain secara total menguat.

PDB memiliki nilai maksimum sebesar 15.832.657 dimiliki oleh Indonesia tahun 2019, pada hal ini menunjukkan pertumbuhan pendapatan masyarakat pada negara Indonesia mengalami kenaikan. Kemudian memiliki nilai minimum sebesar 27.742.810 dimiliki oleh Indonesia tahun 2005 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan pendapatan masyarakat namun tidak maksimal atau tidak sesuai target.

**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

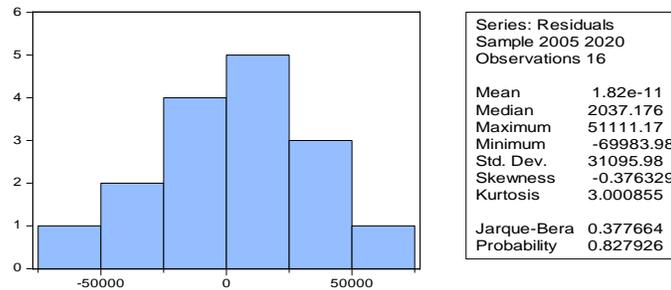
	PPN	INFLASI	KURS	PDB
Mean	328579.7	0.003525	11.49831	9209687.
Median	361148.5	0.049800	11.56950	9080919.
Maximum	537267.0	0.252000	14.48100	15832657
Minimum	101296.0	-0.344200	8.991000	2774281.
Std. Dev.	145462.1	0.181345	2.169592	4391634.
Observations	16	16	16	16

*Sumber : Hasil Olahan Data Eviews 9*

## **UJI ASUMSI KLASIK**

### **Uji Normalitas**

Variabel dependen dan independen dalam model regresi diuji normalitasnya untuk melihat apakah mereka memiliki distribusi normal. Gambar 1 menggambarkan hasil uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas dapat ditunjukkan bahwa  $H_0$  diterima karena asumsi normalitas yang diperlukan untuk model regresi terpenuhi karena probabilitas Jarque-Berra adalah  $0,8279 > 0,05$ .



**Gambar 1. Uji Normalitas**

### **Uji Multikolinearitas**

Untuk memastikan tidak ada hubungan antara variabel independen dalam model regresi, dilakukan uji multikolinearitas. Faktor inflasi dimodifikasi untuk uji multikolinearitas. Tabel 3 menampilkan hasil pengolahan uji multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance masing-masing variabel  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$ . Dengan demikian, hasil model stabil dan terbebas dari masalah multikolinearitas.

**Tabel 3. Uji Multikolinearitas**

Variable	Coefficient Uncentered		Centered
	Variance	VIF	VIF
C	4.94E+09	65.39437	NA
INF	3.06E+09	1.248821	1.248318
KURS	85892369	155.3401	5.017456
PDB	0.002378	32.45880	5.554422

*Sumber : Hasil Olahan Data Eviews 9*

### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji Breusch-Pagan-Godfrey untuk heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah varian dalam model regresi konsisten dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Hasil pengolahan uji Breusch-Pagan-Godfrey ditampilkan pada Tabel 4. Karena tidak terjadi heteroskedastisitas dan nilai Chi-Square  $p > 0,0674 > 0,05$

menunjukkan informasi dari tabel maka  $H_0$  dapat diterima dan dapat dituliskan dalam model regresi yang digunakan.

**Tabel 4. Uji Heterokedastisitas**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	2.421541	Prob. F(3,9)	0.1331
Obs*R-squared	7.146429	Prob. Chi-Square(3)	0.0674

Sumber : Hasil Olahan Data Eviews 9

### Uji Autokolerasi

Metode uji LM digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara galat interferensi periode t-1 dengan galat interferensi periode t-1 pada model regresi linier. Tabel 5 menampilkan hasil pemrosesan untuk uji LM.  $H_0$  berdasarkan informasi pada tabel, dan nilai p Chi-Square  $0,1583 > 0,05$  menunjukkan bahwa model  $H_0$  tidak memiliki autokorelasi.

**Tabel 5. Uji Autokorelasi**

F-statistic	11.90257	Prob. F(2,53)	0.3761
Obs*R-squared	18.59652	Prob. Chi-Square(2)	0.1583

Sumber : Hasil Olahan Data Eviews 9

### Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Tabel 6 menampilkan hasil regresi. Model fit menghasilkan nilai Adjusted R Square yang respon variabel dependen terhadap variabel independen. Pengaruh PDB, inflasi, dan nilai tukar Rupiah terhadap penerimaan PPN sebesar 94,2% berdasarkan nilai *adjusted*  $R^2$  sebesar 0,942; sisanya sebesar 5,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diperhitungkan dalam model penelitian ini. Dengan nilai F statistik 83,52889 dan nilai p 0,000 0,05, maka hasil uji global menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, menunjukkan bahwa paling sedikit satu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel 6. Hasil Uji t (Uji Parsial)**

Variabel	Prediksi	Coef (B)	Sig. Two Tail	Sig. One tailed	Kesimpulan
INFLASI	-	46546.05	0.4165	0.2082	
KURS	+	3855.252	0.6848	0.3424	
PDB	+	0.317390	0.0000	0.0000	
R-squared	0.954301				
Adjusted R-squared	0.942876				
F-statistic	83.52889				
Prob(F-statistic)	0.000000				

*Sumber : Hasil Olahan Data Eviews 9*

## **Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan PPN**

Dari hasil pengolahan data yang ditampilkan pada tabel di atas terlihat jelas bahwa koefisien beta inflasi adalah 46546,05. Nilai p-nya (tingkat signifikansi) adalah 0,2082. Karena data tidak mendukung teori, maka dikatakan bahwa inflasi yang tinggi berdampak pada kenaikan penerimaan PPN. Oleh karena itu, Dapat dikatakan bahwa kenaikan harga tidak selalu meningkatkan penerimaan PPN. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Sinambela dan Rahmawati (2019) dan Ana Arifatunnisa (2002) yang menemukan sedikit bukti dampak inflasi terhadap penerimaan PPN. Berbeda dengan penelitian Sapridawati, Indrawati, Sofyan, dan Ziman (2020) yang menemukan tanda-tanda inflasi pada penerimaan PPN.

### **2. Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Penerimaan PPN**

Data olahan yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah memiliki nilai signifikan (p-value) sebesar  $0,3242 > 0,05$  dan nilai koefisien beta sebesar 3855,252. Asumsi yang dibuat adalah bahwa kenaikan penerimaan PPN disebabkan oleh nilai tukar Rupiah yang cukup tinggi, namun hasil ini bertentangan dengan asumsi tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Nilai Tukar Rupiah belum memberikan dampak yang menguntungkan terhadap penerimaan PPN. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Sinambela dan Rahmawati (2019) dan Ana Arifatunnisa (2002) yang tidak menemukan hubungan antara nilai rupiah dengan penerimaan PPN. Hal ini berbeda dengan penelitian M. Arifin (2015) yang menemukan

bahwa nilai rupiah mempengaruhi penerimaan PPN.

### **3. Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan PPN**

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas, nilai tukar rupiah memiliki nilai signifikan ( $p$ -value) sebesar  $0,3242 > 0,05$  dan nilai koefisien beta sebesar 3855,252 yang terlihat jelas dari data tersebut. Hasil ini menentang teori yang diajukan. Saya sadar bahwa rupiah yang naik mendapat kecaman karena menaikkan pungutan PPN. Uraian di atas menunjukkan bahwa nilai tukar Rupiah tampaknya tidak menguntungkan bagi penerimaan PPN. Kesimpulan penelitian ini sejalan dengan kesimpulan Rosalina (2016), yang menemukan hubungan yang kuat dan menguntungkan antara PDB dan penerimaan PPN.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah, PDB, dan inflasi terhadap penerimaan PPN dari tahun 2005 hingga 2020. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan untuk penelitian ini, dapat dikatakan bahwa: dari tahun 2005 hingga 2020, inflasi tidak berdampak pada penarikan PPN di Indonesia; nilai tukar Rupiah tidak berpengaruh pada mereka selama itu; dan produk domestik bruto memiliki jalur yang menguntungkan bagi mereka selama itu.

Peneliti masa depan dapat menggunakan berbagai ukuran sampel dan kerangka waktu saat melakukan penelitian mereka. Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik sama-sama menyumbangkan data untuk kajian ini. Untuk lebih memahami inflasi, nilai rupiah, dan pengaruh PDB terhadap pemungutan PPN, studi ke depan diharapkan dapat memperluas cakupan pengumpulan data. Menurut temuan analisis, Indonesia memiliki PDB yang cukup besar yang tidak terpengaruh oleh inflasi atau nilai rupiah sebagai mata uang, yang bergerak berbanding terbalik dengan penerimaan PPN negara. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai variabel yang dapat mengubah bagaimana inflasi dan nilai rupiah mempengaruhi PPN.

**DAFTAR REFERENSI**

- Arifatunnissa, A., & Witono, B. (2022). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Atas Dollar As Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015-2019. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11 No. 3
- Bawono, A., & Kava Nasikin, M. (2021). The Analysis of Inflation Effect, Interest Rate and Exchange Rate on Financing: Third-Party Funds as an Intervening Variable of Sharia Banking in Indonesia. *Journal of Islamic Economics*, 5(2), 250–274. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n2.p250-274>
- Benkovskis, K., & Fadejeva, L. (2014). The effect of VAT rate on inflation in Latvia: Evidence from CPI microdata. *Applied Economics*, 46(21), 2520–2533. <https://doi.org/10.1080/00036846.2014.904492>
- Dewi, N.A., & Haryatingsih, R. (2022). Pengaruh Kondisi Perekonomian terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia 2007-2021. *Bandung Conference Series: Economics Studies*. Vol. 2 No. 2.
- Nachrowi, Djalal Nachrowi dan Hardius Usman. (2008). *Penggunaan Teknik Ekonometri, Edisi Revisi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Nuraeni, D. (2011). Skripsi. Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.Jakarta.
- Renata, Almira Herna. (2016). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 9(1).
- Rosyidi, Suherman. (2000). *Teori Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salaswati. 2008. Skripsi. Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kanwil DJP Jakarta Selatan. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Sapridawati, Y., Indirawati, N., Sofyan, A., & Zirman. (2021). Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Pajak Pertambahan Nilai. *The Journal Of Taxation*, 2(1), 75–93.
- Schenk, A., Thuronyi, V., & Cui, W. (2015). *Value added tax*. Cambridge University Press.
- Simarmata, M. M. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Indonesia. *Quantitative Economics Journal*, 7(1).
- Sinambela, T., & Rahmawati, S. (2019). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Ekuivalensi: Jurnal Ekonomi Bisnis*. Vol. 5, No. 1
- Sukamso. (2017). Tesis. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Sumatera Utara. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara. 61

- Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- Utari, W. (2008). Analisis Fundamental Ekonomi Makro Serta Pengaruhnya dan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Neo-Bis*, 2(1), 55- 7
- Yuliyanti, A. A., & Estiningrum, S. D. (2021). Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Ekspor Terhadap Pajak Pertambahan Nilai PT Unilever Indonesia, Tbk. *Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnins*, 4(2), 421–428.